

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ki Hajar Dewantara dalam Pristiwanti (2022) menjelaskan bahwa “pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, maksudnya pendidikan menuntun masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”. Undang-undang no.20 tahun 2003 dalam Ichsan (2021) tentang sistem pendidikan, menyatakan bahwa pendidikan ialah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian pendidikan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) merupakan metode, cara, maupun tindakan membimbing. Secara luas pendidikan adalah pengetahuan yang dimiliki individu untuk belajar sepanjang hayatnya di mana-pun dan dalam kondisi apa-pun sehingga memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap individu.

Pendidikan dalam artian sempit adalah sekolah, seseorang menjadi murid di sekolah atau sebagai mahasiswa yang pada intinya seseorang yang dikatakan sedang menempuh pendidikan dapat diartikan juga sedang

menempuh jenjang pendidikan secara formal (Syaban, 2019). Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala aktivitas yang di usahakan seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baik secara formal maupun secara nonformal sehingga individu tersebut mendapatkan kompetensi yang baik dan mempunyai jiwa kesadaran penuh terhadap sesuatu dan permasalahan sosial di sekitarnya. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dapat di antisipasi dengan memberikan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi.

Korupsi menjadi masalah yang paling marak terjadi di Indonesia (Suyitno, et al. 2019). Korupsi mudah terjadi dimana-mana dan meluas dalam berbagai elemen kehidupan masyarakat. Perbuatan korupsi di Indonesia sudah membudaya yang di mana perbuatan korupsi seolah-olah menjadi perbuatan yang harus dilakukan demi kepentingan pribadi dan tentunya merugikan banyak pihak serta menambah buruk citra Negara Indonesia dimata dunia. Perkembangan perilaku korupsi yang seakan-akan menjadi hal yang lazim terjadi di kehidupan masyarakat, hal tersebut yang menjadikan korupsi di negara Indonesia ini susah untuk diatasi (Ahmad, et al. 2019). Perlunya upaya-upaya yang efektif untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Pengenalan nilai-nilai antikorupsi perlu dimulai dari sejak dini, salah satu upaya mengurangi perilaku korupsi dapat di lakukan dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi di sekolah dasar. Penanaman nilai-nilai antikorupsi untuk anak usia dini bertujuan untuk membentuk sikap dan

perilaku yang baik sejak usia dini supaya saat mereka dewasa dan menjadi pemimpin, pejabat, maupun menjadi masyarakat pada umumnya.

Perilaku korupsi sebenarnya sudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya orang dewasa yang melakukan perbuatan korupsi namun anak-anak usia sekolah dasar juga sudah melakukannya dalam kehidupannya. Permasalahan masih banyak di temui di sekolah dasar, permasalahan itu sebenarnya sederhana namun berdampak tidak baik ke depannya bagi peserta didik. Seperti melakukan kecurangan saat ulangan, dan mengerjakan tugas (Nestariana, N. 2023). Contoh perbuatan korupsi yang dilakukan anak sekolah dasar seperti berbohong ketika ada iuran atau pembayaran di sekolah dengan melebihkan nominal yang seharusnya, korupsi dalam hal waktu salat, dan terlambat datang terlambat ke sekolah juga dapat dikatakan perilaku korupsi waktu belajar di sekolahan. Dengan hal-hal kecil itulah yang menjadikan korupsi susah ditangani dimasa yang akan datang. Namun dengan hadirnya pendidikan antikorupsi di sekolah dasar dapat mengurangi dan mengatasi perbuatan-perbuatan korupsi yang dilakukan oleh peserta didik (Sakinah, et al. 2019).

Pendidikan antikorupsi adalah salah satu upaya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya perilaku tindak korupsi. Oleh sebab itu pendidikan antikorupsi perlu diberikan pada peserta didik mulai dari tingkat sekolah dasar diajarkan dan dicontohkan oleh guru, dari lingkungan keluarga diajarkan dan dicontohkan oleh orang tua, dan di lingkungan masyarakat sekitar. Pada penelitian ini lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai

antikorupsi pada sekolah dasar. Guru mempunyai peranan untuk menanamkan dan memberi contoh kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini diperkuat oleh Suyitno dan Y. Hidayah (2019), bahwa strategi yang digunakan guru untuk menanamkan nilai antikorupsi dapat dilakukan dalam kegiatan di luar kelas. Pendidikan antikorupsi yang diterapkan disekolah diformulasikan untuk mencegah dan mengurangi perilaku korupsi sejak usia sekolah dasar.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi yang paling relevan diterapkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Menanamkan pembiasaan untuk selalu jujur adalah salah satu upaya yang baik untuk menjadikan pribadi peserta didik selalu berbuat dalam hal kebaikan. Jujur merupakan hal yang kecil namun dapat berdampak baik bagi yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, dengan adanya kejujuran dalam diri peserta didik diharapkan mendorong peserta didik untuk menjauhi perilaku korupsi (Mukti, 2018). Dengan dibiasakan hal tersebut maka nilai-nilai itu akan tertanam dalam diri peserta didik hingga mereka menjadi dewasa.

Kebiasaan-kebiasaan baik tidak luput dari contoh yang diberikan oleh guru, seorang guru harus mencontohkan kepada muridnya dalam melakukan hal positif, supaya peserta didik meniru perilaku positif yang dicontohkan gurunya. Kemudian guru harus terampil dalam membimbing peserta didiknya, membimbing yang dimaksud adalah membimbing peserta didik yang sedang bermasalah dan peserta didik yang biasa-biasa saja.

Pendidikan antikorupsi mempunyai tujuan untuk membiasakan perbuatan baik sejak dini. Hal itu diawali dengan penanaman nilai-nilai yang mendasar seperti jujur, disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan adil (Nazifah, 2020). Sehubungan dengan hal di atas maka peserta didik butuh pembekalan pendidikan antikorupsi agar tumbuh kesadaran pada diri peserta didik untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter dan memiliki kualitas. Pendidikan antikorupsi dilakukan secara berjenjang dari tahap dasar sampai atas, pendidikan formal merupakan pilihan yang sangat cocok pada masa saat ini (Rofiq et al, 2022).

Pendidikan formal terdapat bermacam-macam mata pelajaran yang termuat di dalamnya, dari berbagai macam mata pelajaran yang diberikan pendidikan anti korupsi sangat relevan untuk dipadukan atau diterapkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar seluruh masyarakat Indonesia untuk berperilaku baik, sehingga Pancasila dianggap sebagai ideologi yang bersifat universal (Adha, 2020).

SD Muhammadiyah Kayen Yogyakarta merupakan sekolah dasar yang berada dalam naungan Muhammadiyah. Salah satu hal yang menarik dari SD ini adalah sudah menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai perhatian yang lebih, dapat dilihat dari sudah adanya buku pendidikan antikorupsi yang di pajang dan pendidikan antikorupsi diterapkan di semua mata pelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut SD Muhammadiyah Kayen memandang bahwa perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia memerlukan perhatian khusus dan harus ditanggulangi mulai dari usia dini. Mata

pelajaran pendidikan pancasila menjadi mata pelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi didalamnya.

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian di SD Muhammadiyah Kayen Yogyakarta pada hari Senin 23 Oktober 2023 masih ada beberapa peserta didik yang memerlukan bimbingan dan pendampingan dari guru untuk menerapkan nilai-nilai antikorupsi dikarenakan tidak semua peserta didik paham akan korupsi dan nilai-nilai antikorupsi itu sendiri. Untuk itu peserta didik memerlukan bimbingan dan pendampingan yang lebih intens terkait nilai-nilai antikorupsi ini, sehingga peserta didik mampu memaknai bahwa perilaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dan untuk menghindari perilaku tersebut memerlukan nilai-nilai antikorupsi yang tertanam dalam diri. Hal ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di SD Muhammadiyah Kayen Yogyakarta dari penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk membentuk peserta didik yang memiliki akhlak yang baik dan wawasan terkait dengan perilaku korupsi.

Melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas satu dan empat diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perilaku tindak korupsi sejak dini bahkan di kehidupan dewasanya kelak baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut maka peneliti memfokuskan untuk mengkaji penelitian dengan

judul “Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SD Muhammadiyah Kayen Yogyakarta”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Maraknya kasus korupsi yang terjadi di dalam berbagai elemen kehidupan masyarakat.
2. Kurangnya pendidikan antikorupsi sejak dini di sekolah dasar.
3. Perilaku korupsi tidak hanya dilakukan orang dewasa bahkan anak-anak usia sekolah dasar juga sudah melakukannya.
4. Kurangnya peran guru dalam memberikan contoh pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran.
5. Kurangnya pendampingan dan bimbingan guru terhadap peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi terlebih dalam Pendidikan Pancasila.
6. Kurangnya pembekalan pendidikan antikorupsi pada peserta didik.
7. Beberapa peserta didik di SD Muhammadiyah Kayen Yogyakarta belum paham akan perilaku korupsi dan bagaimana cara mencegah dan mengurangi korupsi.
8. Pentingnya penanaman nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka perlu adanya fokus penelitian yang penulis fokuskan adalah Penanaman nilai-nilai antikorupsi di sekolah dasar yang relevan untuk diterapkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas satu dan kelas empat karena pada kelas tersebut sudah menerapkan kurikulum merdeka.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan fokus penelitian tersebut maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanaman nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SD Muhammadiyah Kayen Yogyakarta?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SD Muhammadiyah Kayen Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikembangkan maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penanaman nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SD Muhammadiyah Kayen Yogyakarta.

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SD Muhammadiyah Kayen Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan terutama pada penanaman nilai-nilai antikorupsi yang ada di SD Muhammadiyah Kayen Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan perhatian sekolah terhadap perilaku korupsi dan penanaman nilai-nilai antikorupsi bagi peserta didik.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada guru tentang cara menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas khususnya kelas satu dan empat.

c. Bagi Peserta Didik

Hasil penelitian ini dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai antikorupsi dan melakukan tindakan pencegahan perilaku korupsi dari hal yang sederhana.

d. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi dan pembaharuan penelitian bagi peneliti lanjutan untuk mengetahui tentang penanaman nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar.